

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Setiap daerah dalam menjalankan roda perekonomiannya dengan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan pendapatan, pendapatan tersebut biasa disebut dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah bermaksud untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonominya sesuai dengan potensi sebagai perwujudan desentralisasi, Pendapatan Asli Daerah berasal dari beberapa sumber. Sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah lain yang sah, sehingga pajak daerah merupakan salah satu sumber bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat daerah yang dapat dipaksakan tanpa mendapatkan kontraprestasi secara langsung.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 tahun 2011 tentang pajak daerah Provinsi Jawa Tengah yang mengungkapkan bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai pemerintahan daerah. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 terdapat perbedaan jenis pajak daerah provinsi dan kabupaten/kota. Pembagian ini dilakukan sesuai dengan dasar pengenaan dan pemungutan masing-masing jenis pajak pada wilayah provinsi dan kabupaten/kota yang bersangkutan. Pajak Provinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok. Sedangkan Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Berikut ini sumber-sumber pajak daerah yang dipungut oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.

Tabel 1.1  
Sumber Pajak Daerah Yang Dipungut Oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2019 (dalam persentase)

No.	Jenis Pajak	Tahun (dalam persen)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	112,73	92,36	106,84	107,73	107,41
2.	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	68,25	71,94	99,01	111,82	104,18
3.	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	96,32	61,56	100,22	104,61	100,74
4.	Pajak Air Permukaan (PAP)	141,20	123,35	134,39	127,29	121,31
5.	Pajak Rokok	0,00	99,05	109,93	95,94	89,47

Sumber: Sistem Informasi PAD Online © 2015-2019 Bidang Lahtabang

Berdasarkan tabel 1.1 pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu pajak yang memiliki potensi yang cukup besar bagi pajak daerah di Provinsi Jawa Tengah. Jawa Tengah adalah salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di bagian tengah Pulau Jawa dan memiliki Ibukotanya yang terletak di Semarang. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga saat ini masih mengandalkan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor sebagai sumber pajak daerah yang berpotensi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam beberapa tahun ke depan. Apalagi kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Tengah cukup banyak diminati karena menjadi kebutuhan bagi masyarakat sebagai alat transportasi. Hal tersebut mengakibatkan meningkatkan jumlah kendaraan bermotor dan memicu meningkatnya kemacetan. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 tahun 2011 yang mengungkapkan bahwa Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan atas kendaraan bermotor, meliputi semua kendaraan beroda dan sejenisnya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga bergerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat berat dan alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor yang tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Dengan adanya peningkatan jumlah kendaraan bermotor berarti meningkatnya jumlah objek pajak sehingga dapat meningkatkan kontribusi terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor, namun hal tersebut juga dapat menimbulkan tunggakan pajak kendaraan bermotor di provinsi Jawa Tengah. Hal tersebut seharusnya menjadi evaluasi bagi pihak pemerintah untuk dapat mencegah terjadinya peningkatan tunggakan pajak di tahun mendatang, instansi Badan Pengelola Pendapatan Daerah menerapkan sistem penagihan tunggakan pajak kendaraan bermotor yaitu Door To Door (D2D) dan Collection Room (CR). Apabila dengan kedua sistem penagihan tunggakan pajak tersebut dapat efektif berdampak pula bagi penerimaan pajak kendaraan bermotor. Yang menjadi permasalahan yaitu adanya tunggakan pajak kendaraan bermotor serta terjadinya penurunan tingkat ketercapaian penerimaan pajak kendaraan bermotor dengan melakukan analisis terhadap masalah tersebut pemerintah dapat melakukan evaluasi untuk meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor agar dapat mencapai target. Apabila pajak kendaraan bermotor dapat mencapai atau bahkan melebihi target setiap tahunnya, maka pajak kendaraan bermotor dapat berpotensi untuk memberikan kontribusi lebih bagi pajak daerah sehingga pajak daerah dapat meningkatkan kontribusinya terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah) di Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengemukakan dan membahas mengenai **“Deskripsi Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2019”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang terdapat pada Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Jawa Tengah, sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan penerimaan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2015-2019?
2. Bagaimana kontribusi penerimaan pajak kendaraan bermotor bagi pajak daerah dan pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi Jawa Tengah?
3. Bagaimana efektivitas penagihan tunggakan pajak kendaraan bermotor melalui sistem Door To Door (D2D) dan sistem Collection Room (CR)?
4. Bagaimana perkembangan tunggakan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Tengah dan apa penyebab tunggakan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Tengah ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perkembangan penerimaan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Tengah.
2. Untuk mengetahui besarnya kontribusi (dalam persen) penerimaan pajak kendaraan bermotor bagi pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
3. Untuk mengetahui efektivitas penagihan tunggakan pajak kendaraan bermotor melalui sistem Door To Door dan sistem Collection Room

yang diterapkan oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah.

4. Untuk mengetahui perkembangan dan penyebab terjadinya tunggakan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Tengah.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Bagi Penulis

Dapat mengetahui sistem penagihan pajak kendaraan bermotor dan dapat mengetahui penyebab tunggakan pajak serta upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

2. Bagi Pembaca

Dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang pajak kendaraan bermotor serta dapat dijadikan referensi untuk penelitian bagi mahasiswa lainnya.

3. Bagi Badan Pengelola Pendapatan Daerah

Dapat dijadikan sebagai suatu masukan bagi Badan Pengelola Pendapatan Daerah untuk menyelesaikan permasalahan yang dibahas dan untuk melakukan pengembangan guna meningkatkan kinerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah dalam melaksanakan suatu tugas maupun tanggung jawabnya.

## 1.5 Sistematika Penulisan

Dalam menyusun tugas akhir terdapat sistematika penulisan dapat dibagi menjadi beberapa bab untuk memudahkan pembaca memahami isi penelitian, sebagai berikut:

### BAB I Pendahuluan

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah yang akan dilakukan penelitian, Rumusan masalah, Tujuan praktek penelitian, Manfaat yang akan diperoleh berbagai pihak dalam penelitian dan Sistematika penulisan

### BAB II Landasan Teori

Bab ini membahas mengenai dasar-dasar teori yang dapat membantu memecahkan masalah dalam perumusan masalah yang akan diselesaikan.

### BAB III Gambaran Umum dan Metode Penulisan

Bab ini membahas mengenai gambaran umum dari Badan Pengelola Pendapatan Daerah Jawa Tengah, Sejarah berdirinya, Visi dan Misi, Struktur Organisasi dan Lokasi dari Badan Pengelola Pendapatan Daerah Jawa Tengah. Dalam bab ini juga membahas mengenai metode penulisan yang digunakan untuk menganalisis data dalam membahas permasalahan yang diteliti.

#### BAB IV Pembahasan

Bab ini membahas mengenai hasil analisis permasalahan yang diteliti dan menjawab tentang permasalahan yang diteliti dengan menggunakan metode yang sesuai kemudian dapat diperoleh hasil yang sesuai dengan tujuan penelitian.

#### BAB V Penutup

Bab ini berisi kesimpulan mengenai hasil pembahasan atas permasalahan yang diteliti dan saran guna memberikan solusi bagi permasalahan yang terdapat pada peneliti.

